

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN NOMOR 02 T.ENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)



NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh :

IFA DETRI STEFANI

B200100013

**JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membuat Naskah Publikasi ini dengan judul :

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)

Yang ditulis oleh :

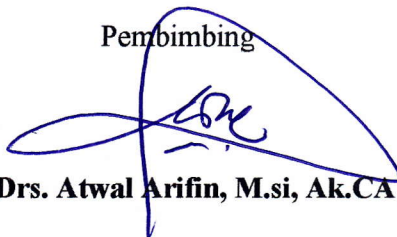
IFA DETRI STEFANI

B200100013

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Oktober 2014

Pembimbing

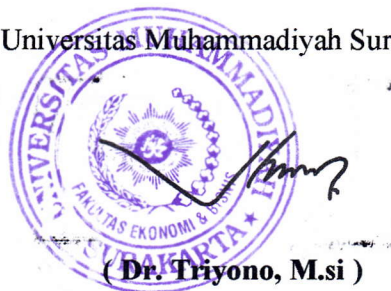


(Drs. Atwal Arifin, M.si, Ak.CA)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.si)

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)

IFA DETRI STEFANI

B200100013

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : ifadetri.stefani@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor.02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip dalam penyajian LRA, Pengakuan dalam penyajian LRA, Pengukuran dalam penyajian LRA, dan dilihat secara keseluruhan apakah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.

Kata Kunci : *Penerapan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penerapan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

Adanya peraturan tersebut, pada kenyataannya BPK masih banyak menemukan penyimpangan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Salah satu contoh penemuan BPK Banten yang menemukan penyimpangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah

Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 sebesar Rp.18,56 milyar. Atas temuan itu BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2009. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemkot Tangerang selatan dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 (Djuitaningsih T., Oktafani M.: 2012). Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul: **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan).**

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Basis Akuntansi
2. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya.
3. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Pengakuan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
5. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Pengukuran dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
6. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan sudah sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antarlain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barangdan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut KSAP dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang

memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan pada sektor publik.

Meskipun di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi berbasis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan basis kas. Adapun struktur SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) yaitu Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. PSAP 12 Laporan Operasional.

C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

e. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah suatu penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

f. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mempunyai ciri-ciri yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan saat sekarang atau masalah-masalah yang bersifat aktual, dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang

diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional (Hadari Nawawi 1983:63).

Penelitian ini berupa kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan seberapa jauh penerapan PSAP 02 dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan. Pendeskripsian dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang menangani keuangan pada 15 dinas di Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampel, adapun kriterinya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bendahara pada setiap dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Mengembalikan Kuesioner.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berasal dari jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang berisi informasi-informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat non-interaktif yang meliputi teknik kuesioner dan partisipasi tidak berperan (Sutopo 2006:9).

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu

mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.

F. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup dengan bentuk *skala likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut adalah scoring jawaban responden :

Alternatif Jawaban Responden

Jawaban	Nilai
Sangat Sesuai (SS)	5
Sesuai (S)	4
Cukup Sesuai (CS)	3
Kurang Sesuai (KS)	2
Tidak Sesuai (TS)	1

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus untuk menghitung panjang kelas, Menurut Sugiyono (2007:80), rumus panjang kelas interval sebagai berikut :

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Banyak Kelas interval}}$$

Selanjutnya setelah ditentukan panjang kelas interval, Data yang diperoleh tentang penerapan PSAP 02 kemudian di rata-rata dengan rumus:

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Jumlah nilai responden}}{\text{jumlah responden}}$$

G. Pengujian Instrumen

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Rumus yang digunakan adalah korelasi *Product moment* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Pearson – r

$\sum x$ = Jumlah skor distribusi x

$\sum y$ = Jumlah skor distribusi y

$\sum xy$ = Jumlah perkalian skor x dan y

n = Jumlah responden yang mengisi kuesioner

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor distribusi x

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor distribusi y

Instrumen dikatakan valid apabila $r_{xy} > r$ dengan r tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan N = 30 sebesar 0,361.

2. Reliabilitas

Dalam penelitian ini Pengujian Reliabilitas Instrumen yang digunakan penulis adalah *Internal consistency*.. Pengujian reliabilitas instrumen yaitu dengan rumus:

$$V = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$
$$r_{11} = 2 \left(1 - \frac{V_1 - V_2}{V_t} \right)$$

Keterangan :

r_{11} = reliabilitas internal seluruh instrument

V_1 = Varian skor ganjil

V_2 = Varian skor genap

V_t = Varian total yaitu skor total

Instrumen ini dikatakan reliabel apabila $r_{11} > r$ tabel dengan r tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan $N = 30$ sebesar $0,361$.

HASIL PENELITIAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

No.Item	Rxy	R tabel	Keterangan
1	0,784	0,361	Valid
2	0,769	0,361	Valid
3	0,754	0,361	Valid
4	0,785	0,361	Valid
5	0,653	0,361	Valid
6	0,640	0,361	Valid
7	0,513	0,361	Valid
8	0,640	0,361	Valid
9	0,788	0,361	Valid
10	0,527	0,361	Valid
11	0,739	0,361	Valid
12	0,815	0,361	Valid
13	0,838	0,361	Valid
14	0,708	0,361	Valid
15	0,762	0,361	Valid
16	0,474	0,361	Valid
17	0,552	0,361	Valid
18	0,697	0,361	Valid
19	0,526	0,361	Valid
20	0,857	0,361	Valid
21	0,881	0,361	Valid

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Dimana $r_{xy} > r$ dengan r tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan $N = 30$ sebesar $0,361$.

2. Uji Reliabilitas

Langkah pencarian reliabilitas dijabarkan di bawah

$$\text{Diket : } N = 30$$

$$\sum x = 1257$$

$$\sum y = 1131$$

$$\begin{aligned}
V_1 &= \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / N}{N} \\
&= \frac{(1257)^2 - (1257)^2 / 30}{30} \\
&= \frac{1580.049 - 52668.3}{30} \\
&= 50912,69
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= \frac{\sum y^2 - (\sum y)^2 / N}{N} \\
&= \frac{(1131)^2 - (1131)^2 / 30}{30} \\
&= \frac{1.279.161 - 42.638,7}{30} \\
&= 41217,41
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_t &= V_1 + V_2 \\
&= 50912,69 + 41217,41 \\
&= 92130,1
\end{aligned}$$

Jadi, reabilitas (r_{11}) adalah

$$\begin{aligned}
r_{11} &= 2 \left(1 - \frac{V_1 - V_2}{V_t} \right) \\
&= 2 \left(1 - \frac{50912,69 - 41217,41}{92130,1} \right) \\
&= 2 (1 - 0,105) \\
&= 2 (0,895) \\
&= 1,79
\end{aligned}$$

Dengan demikian r_{11} hasil perhitungan dengan r tabel $N = 30$ ($=0,361$) maka didapat $r_{11} > r$ tabel atau $1,79 > 0,361$. Jadi reabilitas instrumen = 1,79. Berdasarkan uji coba instrument ini sudah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

B. Hasil Pengolahan Data

1. Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	-
2	Sesuai	4	41
3	Cukup Sesuai	3	33

4	Kurang Sesuai	2	16
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		90

$$Rata - rata = \frac{jumlah\ nilai\ responden}{jumlah\ responden}$$

$$Rata - rata = \frac{295}{90} = 3,27$$

Dari hasil rata-rata sebesar 3,27 maka diketahui bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan PSAP 02 dimana basis yang digunakan basis kas. Hal ini berarti Penerapan Basis Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	68
2	Sesuai	4	101
3	Cukup Sesuai	3	40
4	Kurang Sesuai	2	1
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		210

$$Rata - rata = \frac{jumlah\ nilai\ responden}{jumlah\ responden}$$

$$Rata - rata = \frac{866}{210} = 4,12$$

Dari hasil rata-rata sebesar 4,12 maka diketahui bahwa Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan PSAP 02 dimana informasi yang digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	-
2	Sesuai	4	27
3	Cukup Sesuai	3	42
4	Kurang Sesuai	2	21
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		90

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{jumlah nilai responden}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{273}{90} = 3,03$$

Dari hasil rata-rata sebesar 3,03 maka diketahui bahwa Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan cukup sesuai dengan PSAP 02 karena sudah menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Hal ini berarti Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Pengakuan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	58
2	Sesuai	4	78
3	Cukup Sesuai	3	42
4	Kurang Sesuai	2	3
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		181

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{jumlah nilai responden}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{726}{181} = 4,01$$

Dari hasil rata-rata sebesar 4,01 maka diketahui bahwa Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan PSAP 02 dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	16
2	Sesuai	4	22
3	Cukup Sesuai	3	21
4	Kurang Sesuai	2	1
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		60

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{jumlah nilai responden}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{233}{60} = 3,88$$

Dari hasil rata-rata sebesar 3,88 maka diketahui bahwa Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan PSAP 02 karena pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupiah. Hal ini berarti Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

C. Hasil Penelitian

No	Kriteria Nilai	Interval	Frekuensi
1	Sangat Sesuai	5	142
2	Sesuai	4	269
3	Cukup Sesuai	3	178
4	Kurang Sesuai	2	42
5	Tidak Sesuai	1	-
	Total		631

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{jumlah nilai responden}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Rata - rata} = \frac{2393}{631} = 3,79$$

Dari hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 3,79 dapat dinyatakan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dilihat dari Basis Akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,27 dimana basis yang digunakan adalah basis kas.
2. Dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 4,12 dimana karakteristik kualitatif yang digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas yang dikehendaki.
3. Dilihat dari Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan cukup sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,03 dimana LRA sudah menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.
4. Dilihat dari Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP

No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 4,01 dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5. Dilihat dari Pengukuran Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,88 dimana pengukuran pos-pos dalam LRA menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima/dikeluarkan.
6. Dilihat secara keseluruhan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,79.

B. Saran

1. Hendaknya penelitian selanjutnya dilakukan tidak hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan saja.
2. Hendaknya penelitian selanjutnya ditambahkan juga populasi pada Badan-badan di pemerintahan.
3. Hendaknya pada penelitian selanjutnya sampel tidak hanya Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Bendahara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Keenam, Cetakan Kertigabelas : Rineka, Jakarta.
- Bambang Supomo dan Nur Indranto, 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia.
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit BPEE UGM
- Djultaningih, T. dan M. Oktafani. 2012. Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-24.

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Jakarta: Salemba empat.
- H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kesepuluh Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan (2014). Gambaran Umum Kabupaten Grobogan. Diakses dari grobogan.go.id/.../ilppd%20kab.%20grobogan%20tahun%202008.pdf. [12 September 2014].
- _____ (2014). Visi dan misi Kabupaten Grobogan. Diakses dari grobogan.go.id/pemerintahan/profil-pemerintahan/visi-misi.html. [12 September 2014]
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Purba, Elvis. Dan Parultan Simanjuntak. 2011. *Metode Penelitian*, Edisi Kedua. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Simanihuruk, M. H. 2013. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

